

Kebudayaan Modern dalam Sistem Demokrasi Indonesia

Wiratmo SOEKITO

PERUBAHAN-PERUBAHAN di Eropa Timur mungkin tidak akan berpengaruh terhadap sistem Demokrasi Indonesia yang berdasarkan Pancasila selama tidak berpengaruh terhadap partai-partai komunis di Asia seperti yang diklaim oleh Cina.

Di masa yang lalu banyak timbul kekawatiran bahwa partai-partai komunis di negara-negara non-komunis akan dapat merebut kekuasaan melalui pemilihan umum. Ambillah contoh hasil pemilihan umum di Cekoslovakia pada tahun 1946 yang menunjukkan bahwa partai komunis telah meraih suara terbanyak, meskipun hanya 38%, sehingga diperlukan koalisi dengan partai sosialis. Sebagaimana pemilihan umum di Jerman pada tahun 1933 tidak berhasil memberikan mayoritas kepada partai apa pun, tetapi partai Nazi telah meraih suara terbanyak sebesar 44%, demikianlah pada pemilihan umum di Cekoslovakia pada tahun 1946. Namun, suara di bawah mayoritas telah cukup untuk merebut kekuasaan dari dalam guna selanjutnya menciptakan sistem diktatorial di atas kuburan demokrasi.

Terutama sejak Partai Komunis Cekoslovakia merebut kekuasaan dari dalam pada awal tahun 1948, hanya 27 bulan setelah pemilihan umum yang bebas dan rahasia, banyak yang merasa khawatir bahwa di negara-negara non-komunis, melalui pemilihan umum, partai komunis akhirnya akan merebut kekuasaan dari dalam. Demikianlah pula pemilihan umum di Indonesia pada tahun 1955, kendatipun hanya berhasil meraih suara 16,4%, partai komunis dapat meningkatkan jumlah kursinya di parlemen dari 17 menjadi 39 kursi, sehingga masuk Empat Besar. Seandainya keinginan alm. Presiden Soekarno untuk membentuk Kabinet Kaki Empat terpenuhi dikhawatirkan bahwa partai komunis dapat merebut kekuasaan dari dalam seperti yang telah terjadi di Cekoslovakia pada tahun 1948.

Akan tetapi, empat dasawarsa setelah Cekoslovakia -- dan semua negara Eropa Timur yang diduduki oleh Tentara Merah (Soviet) pada akhir Perang Dunia II -- jatuh ke dalam kekuasaan partai komunis, pemilihan-pemilihan umum yang bebas dan rahasia di negara-negara komunis berakhir de-

ngan kekalahan partai komunis setempat. Jerman Timur dan Hongaria merupakan contoh-contoh nyata, sedangkan di Uni Soviet dan Polandia jumlah kursi parlemen yang diperebutkan oleh calon-calon nontunggal dibatasi hanya sampai 35% saja. Bahwa partai komunis akan dikalahkan dalam pemilihan umum yang bebas dan rahasia sebenarnya sudah harus diketahui ketika gagasan Erokomunisme dikecam oleh Kremlin di masa mendiang Presiden Brezhnev. Erokomunisme adalah aliran di kalangan partai-partai komunis di Eropa Barat yang ingin mencapai kekuasaan negara secara parlementer tanpa menggunakan hasil pemilihan umum yang bebas dan rahasia untuk menciptakan negara komunis seperti yang telah terjadi di Cekoslowakia pada tahun 1948.

Memang di Indonesia sudah lama tidak terdapat lagi kekhawatiran bahwa partai komunis akan dapat merebut kekuasaan karena telah dilarang sejak tahun 1966, sehingga tidak mungkin mengambil bagian dalam pemilihan umum. Padahal, seandainya tidak dilarang -- sambil mengingat dualisme dalam partai-partai komunis yang dapat dilihat dari gejala Cekoslowakia di musim semi Praha tahun 1968 -- tidak akan mampu menggunakan pemilihan umum untuk merebut kekuasaan dari dalam. Kendatipun kemajuannya dalam pemilihan umum tahun 1955, namun partai komunis masih tetap mendasarkan strategi perebutan kekuasaan secara ekstra-parlementer seperti yang telah dibuktikannya pada tahun 1965.

Kekalahan partai-partai komunis itu merupakan salah satu ciri utama dari perubahan-perubahan di Eropa Timur, meskipun masih menjadi pertanyaan, apakah partai-partai komunis juga akan mengalami kekalahan di Asia bila diselenggarakan pemilihan

umum yang bebas dan rahasia. Pada hakikatnya pertanyaan ini tak dapat dijawab, karena para pemimpin partai-partai komunis di Asia tidak akan dapat menerima perubahan-perubahan seperti yang telah terjadi di Eropa Timur.

Ciri utama lainnya dari perubahan-perubahan di Eropa Timur adalah meningkatnya peranan kebudayaan modern dengan eksponen-eksponennya seperti Vaclav Havel di Cekoslowakia dan Anatoli Strelyani di Rusia. Tanpa peningkatan peranan kebudayaan modern tersebut perubahan-perubahan di Eropa Timur sulit dibayangkan.

Perlu diperhatikan bahwa gagasan Gorbachev mengenai perubahan-perubahan di Uni Soviet untuk pertama kali disampaikan dalam pertemuannya dengan sekelompok 30 penulis Soviet terkemuka di Moskwa pada 19 Juni 1986. Dalam pertemuan itu, Gorbachev antara lain mengatakan bahwa masyarakat sudah matang untuk suatu perubahan. Ia juga berbicara tentang demokrasi. Akan tetapi karena di Uni Soviet tidak dikenal oposisi maka diperlukan keterbukaan. Dan mengenai siapa yang harus melaksanakannya (keterbukaan), dikatakannya: "Komite Sentral memerlukan bantuan anda. Anda tak dapat membayangkan betapa kami memerlukan bantuan sekelompok seperti para penulis."

Dalam hubungan ini, tak dapat dikesampingkan peranan Anatoli Strelyani, Ketua Dewan Persatuan Penulis Soviet, karena dari organisasi yang dipimpinnya itulah para penulis Soviet terkemuka yang telah mengadakan pertemuan dengan Gorbachev tersebut berasal. Sebagaimana kebanyakan para penulis Soviet terkemuka, Strelyani mendukung radikalisme pembaruan dan keterbukaan sebagai kebijakan utama Gorbachev.

Pada 15 Mei 1987, 11 bulan setelah pidato Gorbachev yang membentangkan pembaruan (*perestroika*) dan keterbukaan (*glasnost*), Strelyani menyampaikan sebuah pidato di depan sekelompok Pemuda Komunis (*Konsomol*) di Universitas Negeri Moskwa yang mengungkapkan adanya perjuangan kekuasaan antara faksi-faksi pembaru dan konservatif di dalam tubuh Partai Komunis Uni Soviet yang masing-masing dipimpin oleh Gorbachev dan Yegor Ligachev.

Namun, Strelyani lebih radikal daripada Gorbachev dalam menganut garis pembaruan dan keterbukaan. Dalam sebuah pertemuan, ia pernah dikecam oleh Gorbachev, karena majalah bulanan yang dipimpinnya, *Novy Mir* No. 2, 1987, memuat sebuah artikel yang mengatakan bahwa statistik Soviet tak dapat dipercaya. Teman-temannya, yang mendengar bahwa Gorbachev telah mengecamnya, merasa cemas dan berusaha mencari pekerjaan baru untuknya. Dijawab olehnya bahwa ia masih tetap editor *Novy Mir*, sehingga teman-temannya itu pun merasa heran bahwa ia belum juga dipecat setelah dikecam oleh seorang Sekjen PKUS. Menurut Strelyani, ia tidak menulis untuk para pembesar. "Tujuan kami," kata editor majalah bulanan sastra Soviet itu dalam pidatonya, "adalah membantu menyusun sebuah pandangan dunia kontemporer melalui pencerahan dan keterbukaan. Semboyan kami adalah: 'Mencetak apa yang tidak dicetak oleh orang lain.'"¹

Ketika membawakan sebuah paper mengenai peranan pers di Uni Soviet di bawah kepemimpinan Gorbachev pada sebuah konferensi bulan November 1988 di London, Strelyani ditanya pendapatnya mengenai Solzhenitsyn, Pemenang Hadiah Nobel un-

tuk Sastra tahun 1970 yang sejak tahun 1974 diasingkan ke dunia Barat. Menurut jawaban yang diberikannya secara pribadi, tidak dalam semua pandangan politik dan falsafah Solzhenitsyn ia sependapat. Dengan memajukan pertanyaan, "Siapakah yang harus mencegah kami menyatakan keberatan-keberatan dalam buku yang sama,"² Strelyani ingin mengatakan bahwa ia dapat memberi kata pengantar yang menunjukkan bagian-bagian yang tak disetujuinya kepada naskah sebuah novel seperti novel Solzhenitsyn. Sebagai editor, cara ini lebih baik daripada menolak menerbitkannya. Dikemukakannya bahwa "melarang publikasinya berarti mengakui bahwa argumen-argumen anda dengan jelas lebih lemah daripada argumen-argumen Solzhenitsyn."

Pidatonya di London mencerminkan keterbukaannya dalam menguraikan pikirannya mengenai peranan pers di Uni Soviet di bawah pemerintahan Gorbachev. Dengan terus-terang dikatakannya bahwa pers bebas, yang bertanggungjawab atas tindakan-tindakannya dan yang diterbitkan atas risiko sendiri, secara legal tak pernah ada di Uni Soviet. Juga kini pun tidak ada. Aparat-aparat partai, yang ditempatkan dalam staf eksekutif dan senior semua surat kabar dan majalah serta penerbit buku, menjalankan sensor. Setiap nomor surat kabar atau majalah dipelajari secara menyeluruh, dan sesudah itu oleh sensor diadakan analisis tertulis mengenai apa yang dipelajari itu.

Kendatipun mendukung kebijakan Gorbachev, namun secara kritis, Strelyani tak ketinggalan mengecam *glasnost* yang, me-

²Apa yang diinginkan oleh Strelyani tidak lain daripada "dissenting introduction", yang dalam penerbitan Barat sudah lazim misalnya kata pengantar. Harrison E. Salisbury dalam Victor Louis, *The Coming Decline of the Chinese Empire* (New York, 1979).

¹*International Herald Tribune*, 16 Oktober 1987.

nurut hematnya, hanya diperlukan apabila menguntungkan para penguasa. Dengan *glasnost*, para wartawan harus berkelakuan secara bertanggung jawab dalam arti bahwa mereka harus mengatakan secara tidak lengkap, karena makin kabur yang mereka katakan makin baik.

Peningkatan kebudayaan modern dalam menciptakan perubahan-perubahan di Eropa Timur lebih jelas lagi terlihat di Cekoslowakia dengan terpilihnya Havel sebagai presiden -- menggantikan Gustav Husak yang terpaksa mengundurkan diri -- oleh Majelis Nasional pada 29 Desember 1989.

Tak diperbolehkan menuntut studi akademis dengan alasan "latar belakang kelas yang buruk" pada awal tahun 1950-an ketika Cekoslowakia baru beberapa tahun diambil-alih oleh partai komunis yang Stalinis, Havel mencari penghidupannya sebagai seorang buruh kasar dan kemudian menjadi pekerja teater. Akan tetapi, dalam tahun 1960-an ketika Cekoslowakia sudah memasuki masa Post-Stalin -- pada bulan Oktober 1961 Nikita Khrushchev untuk kedua kalinya melancarkan serangan terhadap Stalinisme yang dampaknya lebih hebat di Cekoslowakia bila dibandingkan dengan serangan Khrushchev yang dilancarkan untuk pertama kalinya pada bulan Februari 1956 -- Havel mulai menulis naskah-naskah drama, yang mencerminkan absurditas hubungan-hubungan sosial kontemporer ketika itu.

Peranan drama pentas amat penting selama tahun 1960-an menjelang datangnya Musim Semi Praha 1968 yang membawa gagasan-gagasan pembaruan di bawah kepemimpinan Alexander Dubcek. Kini Dubcek telah "come back," biarpun tidak sebagai Sekretaris Pertama Partai Komunis, melainkan sebagai Ketua Majelis Nasional. Menurut Martin Esslin, seorang kritikus drama dari

Inggris yang mengunjungi Cekoslowakia pada tahun 1968, teater di sana telah memainkan peranan yang teramat penting dalam menunjukkan kepada bangsanya bahwa suasana kejiwaan sedang mengalami perubahan. Bahkan pementasan *Romeo & Juliet* (Shakespeare) di Praha sanggup menyadarkan publiknya akan timbulnya perpecahan di dalam tubuh Partai Komunis Cekoslowakia.³

Dan Havel tidak hanya seorang dramawan dengan karya-karyanya (Pesta Kebun, Ulang Tahun), tetapi juga seorang penulis novel. Pada tahun 1968, ketika terjadi Invasi Cekoslowakia, ia menjadi Ketua Klub Penulis Independen. Sejak tahun 1969 pembacaan karya-karyanya dilarang setelah rezim baru di bawah Husak mengadakan "normalisasi" hubungan-hubungan dengan Uni Soviet. Sejak itulah Havel keluar-masuk penjara. Yang terakhir kalinya dijebloskan ke dalam penjara adalah pada awal tahun 1969 karena mengambil bagian dalam demonstrasi Jan Palach, seorang mahasiswa Cekoslowakia yang membakar diri pada pertengahan bulan Januari 1969 sebagai protes terhadap Invasi Cekoslowakia.

Pada awal tahun 1975 Havel menulis surat kepada Husak memperingatkan bahwa akhirnya rakyat yang tertindas akan menuntut harga atas penghinaan yang terus-menerus terhadap harkat mereka sebagai manusia. Empat bulan kemudian lahirlah Akta Final Helsinki yang mengikat setiap negara penandatangannya, termasuk Cekoslowakia, untuk menghormati hak-hak manusia. Dokumen yang bersejarah ini telah mengilhami Havel untuk menulis Piagam Hak-hak Manusia pada awal tahun 1977, disebut *Piagam 77*, dengan tujuan memantau sam-

³Martin Esslin, *An Anatomy of Drama* (1976), hal. 32.

pai di mana pemerintah Cekoslowakia telah melaksanakan pasal-pasal hak-hak manusia yang terdapat dalam Akta Final Helsinki. Pada tahun itu juga Havel ditangkap dengan tuduhan bahwa tindakannya menulis Piagam 77 di samping suratnya kepada Husak telah merupakan "subversi terhadap Republik Sosialis Cekoslowakia." Pada bulan Oktober, pengadilan menjatuhkan putusan hukuman pidana penjara selama 14 bulan yang pelaksanaannya ditangguhkan dengan bersyarat. Pada bulan Mei 1979 ia ditangkap lagi karena dukungannya kepada Komite Pembelaan bagi Kaum Tertuduh Secara Tak Adil. Bersama-sama dengan lima orang tertuduh, termasuk Jiri Dienstbier (yang kemudian menjadi menteri luar negeri), pada bulan Oktober Havel diperiksa lagi perkaranya di pengadilan dan diganjar dengan hukuman pidana penjara selama empat setengah tahun, tetapi pada bulan Februari 1983 sudah dibebaskan karena alasan kesehatan. Diminta untuk mengundurkan diri dari gerakan Piagam 77, Havel menolak, sehingga kemudian dipenjarakan lagi.

Perlu diketahui bahwasanya dalam pemerintahan Husak terdapat juga para simpatisan pembaruan, tetapi tidak mempunyai keberanian, dan bahkan menganggap Piagam 77 sebagai gerakan "Don Quixotes." Kini tentu saja tak seorang pun yang beranggapan demikian setelah runtuhnya pemerintahan Husak sebagai salah satu benteng anti-pembaruan di dalam Organisasi Pakta Warsawa. Sebab, penulis Piagam 77, Havel, telah terpilih sebagai presiden. Walaupun pencalonannya tunggal, namun tak seorangpun di antara para anggota Majelis Nasional yang diketuai oleh Dubcek itu bersedia dicalonkan ketika dihimbau. Kemudian kesemua anggota Majelis Nasional yang 323 orang jumlahnya itu memberikan suara bulat ketika memilih Havel sebagai satu-

satunya calon presiden. Havel sendiri menerima pencalonan tersebut dengan prasyarat bahwa pemilihan parlementer akan diselenggarakan pada tahun 1990 ini dan parlemen hasil pemilihan bebas nanti akan memilih presiden baru yang akan memegang jabatannya selama lima tahun.

Demikianlah dengan panjang-lebar telah saya bentangkan dua ciri utama dari perubahan-perubahan di Eropa Timur, yaitu, kekalahan yang diderita oleh partai-partai komunis dalam setiap pemilihan bebas, dan peningkatan peranan kebudayaan modern, meskipun kemudian masih harus dilihat terlebih dulu apakah prototipe Havel masih bakal memimpin pemerintahan di Eropa Timur setelah pemilihan-pemilihan bebas. Dalam kerangka ini perlu diperhatikan hasil pemilihan umum di Hongaria pada 25 Maret dan 8 April yang berakhir dengan kemenangan Forum Demokrasi Hongaria yang -- dalam koalisi kanan dengan Partai Tani (*Smallholders*) dan Partai Rakyat Demokrat Kristen -- memiliki garis nasionalisme Kristen, sedangkan Aliansi Demokrat Bebas, yang terdiri dari para profesional dan berbakat, telah mengalami kekalahan.

Salah satu faktor yang menerangkan hasil pemilihan umum ini ialah karena Aliansi Demokrat Bebas dipimpin oleh orang-orang keturunan Yahudi seperti Janos Kis (Ketuanya) dan Ivan Peto. Seandainya yang menang adalah Aliansi Demokrat Bebas, Peto akan menjadi Perdana Menteri. Forum Demokrasi Hongaria dikuasai oleh semangat anti-Semitisme. Para pemimpinnya tidak mempercayai pandangan kosmopolitan kaum intelektual Budapes. Dengan semangat anti-Semitisme inilah mereka berhasil menghimbau rakyat untuk kembali memperhatikan nilai-nilai nasional Hongaria. Di sini dapat dilihat polarisasi antara dua kebuda-

yaan yang secara sederhana dapat dilukiskan sebagai kebudayaan tradisional di satu pihak dan kebudayaan modern di lain pihak. Polarisasi demikian juga terdapat di Indonesia; yang kini sudah bukan lagi polarisasi antara kebudayaan kaum komunis di satu pihak dan kebudayaan non-komunis -- untuk tidak menyebut Manifes Kebudayaan (1963) -- di lain pihak.

Komunisme di Indonesia -- sedikit-tidaknya partainya -- telah mati. Di Eropa Timur, komunisme tidak mati, tetapi partainya mengalami kekalahan besar dalam setiap pemilihan bebas, sehingga dari statusnya yang berperanan terkemuka menjadi terkebelakang, dan ditolak oleh partai-partai Hongaria untuk berkoalisi. Memang di Polandia masih terdapat koalisi antara partai-partai komunis dan non-komunis, tetapi peranan terkemuka sudah diambil-alih oleh solidaritas, serikat buruh bebas yang telah memenangkan keseluruhan 35% calon yang dipersaingkan dalam pemilihan bebas, sedangkan di Uni Soviet pemerintahannya masih tetap merupakan pemerintahan partai komunis.

Dari perubahan-perubahan di Eropa Timur, fenomena Hongaria adalah yang paling menarik, karena munculnya polarisasi kebudayaan yang mengesampingkan peranan komunis, kendatipun partai komunis telah berganti nama dengan partai sosialis. Kebetulan Forum Demokrasi Hongaria yang keluar sebagai pemenang, sehingga koalisi dengan sesama partai yang menganut garis nasionalisme Kristen sudah cukup untuk menguasai mayoritas sederhana di parlemen. Namun, seandainya Aliansi Demokrat Bebas yang keluar sebagai pemenang, faksi komunis, yang hanya menguasai 8% di parlemen, tidak akan diajak berkoalisi. Pendek kata, peranan komunis, apalagi peranan terkemuka, telah berakhir.

Perubahan-perubahan di Eropa Timur ini mungkin terlalu jauh untuk mempunyai dampak atas kita, tetapi sedikit-tidaknya peningkatan peranan kebudayaan di sana dapat menimbulkan daya inspiratif, terutama bagi kebudayaan modern.

Yang harus kita sadari pertama-tama ialah bahwa kebudayaan mempunyai pengertian ekuivokal yang perlu dijelaskan, karena istilah kebudayaan -- tidak hanya di Indonesia, tetapi juga di dunia Barat sendiri -- mulai menimbulkan kesulitan setelah kaum awam memperolehnya dari para anthropolog dan menggunakannya kembali secara tidak tepat. Menurut para anthropolog, kebudayaan adalah semua cara kepercayaan dan kelakuan sebuah suku atau rakyat. Dari kalimat ini saja timbul pemakaian-pemakaian istilah kebudayaan yang berlain-lainan artinya. Berkatalah kaum awam yang sudah belajar kepada para anthropolog bahwa kebudayaan adalah semua cara kepercayaan dan kelakuan sebuah suku atau rakyat. Oleh sebab itu, apabila mereka mengatakan lebih jauh bahwa setiap seniman *bergantung kepada* kebudayaannya timbullah pengertian bahwa kebudayaan itu tidaklah lain kecuali keadaan sosial. Akan tetapi, apabila mereka berkata bahwa setiap seniman *berjuang melawan* kebudayaannya timbullah pengertian lain lagi bahwa kebudayaan adalah kepercayaan-kepercayaan dan adat-istiadat tertentu. Dan seterusnya dan seterusnya sampai pengertian kebudayaan itu terpecah-belah bagaikan atom menjadi beratus-ratus definisinya.

Para budayawan yang mempunyai konsep kebudayaan modern, tidak berpikir seperti para anthropolog mengenai kebudayaan. Ini tidak berarti bahwa para anthropolog tidak boleh berbicara tentang kebudayaan. Setiap sektor ilmiah mempunyai kebebasan

untuk menyelenggarakan kegiatan ilmiahnya masing-masing. Atau, seperti yang dikatakan oleh penyair Inggris Alfred Edward Housman, "Apabila sebuah departemen pengetahuan tertentu menarik perhatian seorang secara khusus, biarkanlah ia melakukan studi tentang itu dan melakukan studinya karena studi itu menarik perhatiannya. Dan janganlah ia dibiarkan membuat-buat permintaan-permintaan maaf untuk apa yang tidak menuntut permintaan maaf, tetapi percayalah akan alasannya mengapa hal itu paling baik baginya.... Kita tidak seperti para Sultan Ottoman dari zaman dahulu yang beranggapan, bahwa mereka tidak akan pernah mengenyam keamanan sesaat pun juga sebelum mereka membunuh semua saudara mereka. Persaingannya bukanlah antara studi-studi seni dan hukum serta ilmu, melainkan antara sesama prajurit dalam perjuangan yang secara paling berhasil dapat mencapai tujuan bersama untuk mempertahankan kembali perbatasan kegelapan."⁴

"Dengan kebudayaan modern, yang saya maksudkan tidaklah lain dari yang telah dirumuskan dalam Manifes Kebudayaan, yaitu, penciptaan kerja yang mengalahkan kementahan alam dengan cara manusia. Atau, dengan perkataan lain, perjuangan manusia sebagai totalitas dalam menyempurnakan kondisi-kondisi hidupnya. Pengertian saya tentang kebudayaan modern memang *tidak* teknis-ilmiah, melainkan "tradisional," dalam arti kegiatan budi dan rohaniah yang dikerjakan oleh manusia orang-seorang. Dari kegiatan inilah lahirnya puisi, novel, musik, lukisan dan seni lainnya tanpa memperhatikan teori tentang bagaimana menciptakannya. Dalam ilmu, seperti yang

dipelajari di antara tembok-tembok universitas, memang teori memimpin praktek seperti yang dapat dibuktikan dalam penyempurnaan teknologi. Akan tetapi, dalam kebudayaan -- menurut pengertian Manifes Kebudayaan dalam perkembangan pemikirannya lebih jauh yang tidak ilmiah -- praktek memimpin teori. Oleh sebab itu, di universitas-universitas yang paling maju sekalipun, sebuah karya sastra harus menunggu dulu dalam waktu yang cukup lama sebelum dipandang sebagai karya klasik (karya terbaik) untuk ruang kelas kuliah.

Di universitas-universitas Amerika, misalnya, sampai tahun 1880 karya-karya Alfred Tennyson (penyair), Robert Browning (penyair), Charles Dickens (novelis) dan William Thackeray (novelis) masih menjadi bacaan-bacaan extra-universiter, bahkan sampai lama sesudah itu. Baru setelah perkembangan-perkembangan ilmu-ilmu eksakta dan fisika terasa sekali pesatnya, ilmu-ilmu sosial dan budaya mulai memperhatikan karya-karya sastra sebagai hasil kegiatan kebudayaan untuk dimasukkan ke dalam "curriculum." Pada hakikatnya, berbeda dengan ilmu-ilmu eksakta dan fisika, ilmu-ilmu sosial dan budaya itu tidak sungguh-sungguh ilmiah. Sebab, menurut prinsip ilmiah, dalam ilmu-ilmu sosial dan budaya pun teori harus memimpin praktek pula. Akan tetapi, teori para sarjana politik bahwa perang tidak bakal pecah lagi di Eropa setelah Kongres Wina (1815) telah dijawab oleh Perang Dunia I (1914-1918) dan II (1939-1945).

Dengan memperhatikan kenyataan bahwa ilmu-ilmu sosial dan budaya itu tidak ilmiah ilmu-ilmu eksakta dan fisika, kita akan lebih memahami apa yang dikatakan oleh Friedrich Nietzsche, "Ilmuwan telah juga menderita, seperti yang dapat kita ha-

⁴Robert Conquest, *The Abomination of Moab* (1979), hal. 189.

rapkan, penyakit-penyakit dan kenakalan-kenakalan seorang yang mempunyai sifat tidak utama: ia penuh iri hati dan mempunyai mata tajam untuk kepicingan sifat-sifat tersebut yang tak sanggup mencapai ketinggian ... kita akhirnya tiba pada suatu pengertian yang lebih dalam tentang keheranan Napoleon ketika melihat Goethe: keheranannya itu mengkhianati apa yang selama seratus tahun kita telah mengira 'jiwa Jerman.' *Voilà un homme!* Dengan ini maksudnya Napoleon ingin berkata: "Mengapa toh seorang Manusia! Dan akan mengharapkan hanya seorang Jerman!"⁵ Demikianlah bagi Napoleon, seorang Goethe -- apalagi bila ditambah dengan seorang Schiller, itu pun baru di bidang sastra dan belum lagi di bidang musik, dan lain-lainnya -- lebih besar daripada seluruh bangsa Jerman, kendati pun dalam sonetnya yang dibacakan pada sebuah pembukaan gedung teater di Lauchstädt pada 26 Juni 1802, Goethe mengatakan bahwa siapa yang ingin besar harus mengangkat diri bersama-sama.

Dengan interpretasi Nietzsche, penemuan Goethe oleh Napoleon di atas telah mengungkapkan suatu polarisasi antara dua kebudayaan. Di satu pihak kebudayaan "jiwa Jerman" dan di lain pihak kebudayaan manusia universal. Kebudayaan terakhir inilah yang merupakan kebudayaan yang diperjuangkan oleh Manifest Kebudayaan sebagai "humanisme universal," sedangkan kebudayaan pertama -- kebudayaan dari tipe "jiwa Jerman" (istilah Nietzsche) -- merupakan kebudayaan yang dipertahankan oleh kaum tradisional. Mengenai yang terakhir ini, adalah inspiratif apa yang dikatakan oleh filsuf Spanyol Jose Ortega Y. Gasset, "Sejak akhir abad ke-18, telah dikirakan secara

semua-maunya dan secara mistikal bahwa ada satu jiwa atau kesadaran sosial, suatu jiwa kolektif, yang oleh kaum romantikis Jerman, misalnya, disebut *Volksgeist*, atau 'jiwa nasional' ... Tetapi saya ulangi, gagasan *jiwa kolektif* ini sebagai gagasan tentang suatu *kesadaran sosial*, adalah mistikisme secara semua-maunya. Tiada *jiwa kolektif* seperti itu, bila dengan jiwa yang diartikan -- dan di sini tidaklah lain artinya dari -- *sesuatu* yang mampu menjadi subyek yang bertanggung jawab atas perbuatan-perbuatannya, *sesuatu* yang melakukan apa yang dilakukannya, karena apa yang dilakukannya itu mempunyai suatu arti yang terang untuk itu."⁶

Namun, seperti yang telah dikatakan oleh Nietzsche, "jiwa Jerman" itu di masa pra-Napoleon telah sempat dominan selama seratus tahun. Bahkan kalau kita perhatikan gejala Hongaria dewasa ini -- dengan kemenangan nilai-nilai Magyar yang dipertahankan menurut garis pendirian nasionalisme Kristen -- dapatlah dilihat bahwasanya kebudayaan dari tipe "jiwa Jerman" itu masih juga hidup, dua abad setelah Napoleon menemukan Goethe. Juga di Indonesia masih sangat kuat seperti yang dapat dilihat dari peranan para antropolog dengan penelitian-penelitian mereka mengenai apa yang mereka sebut kebudayaan.

Sebenarnya adalah suatu paradoks bahwa di satu pihak kebudayaan humanis itu menggali pengertiannya tidak dari akar-akar teknis-ilmiah melainkan "tradisional," sedangkan di lain pihak kebudayaan tradisional menggali pengertiannya tidak dari akar-akar "tradisional" melainkan teknis-ilmiah. Para ilmuwan -- khususnya di bidang

⁵Freidrich Nietzsche, *Jenseits Von Gu und Böse* [Beyond Good and Evil] (1955), oleh Marianne Cowan, hal. 132.

⁶Jose Ortega Y. Gasset, *Man and People* (1957), hal. 174.

anthropologi -- lebih tertarik kepada kebudayaan *Volksgeist* daripada kebudayaan *voilà un home*. Bagi para antropolog (dan kaum awam yang sudah belajar kepada mereka), gotong-royong lebih menarik daripada hak-hak asasi manusia.

Memang dalam masyarakat kita sudah lama terdapat aliran yang cenderung untuk mencari alternatif terhadap peradaban Barat. Aliran ini, yang merupakan gejala anti-Barat, tidak hanya dianut oleh para penganjur sistem-sistem diktatorial seperti yang telah dapat dilihat di Eropa Timur sebelum terjadinya perubahan-perubahan, tetapi juga dianut oleh para penganjur "counter-culture" seperti yang telah dapat dilihat di negara-negara Barat sendiri.

Kedua-duanya -- dalam masyarakat kita, yang pertama dianut oleh kalangan tua, sedangkan yang terakhir dianut oleh kalangan muda -- merupakan pemberontakan terhadap peradaban Barat hasil Revolusi Industri di Eropa dari permulaan abad yang lalu. Pemberontakan ini sebenarnya berasal dari dunia Barat sendiri dan masyarakat kita hanya mengimpor saja dari sana. Bahwa di dunia Barat sendiri pemberontakan terhadap peradaban Barat itu mungkin disebabkan oleh karena, seperti yang dikatakan oleh Goronwy Rees ketika pada bulan Oktober 1978 memperingati seperempat abad majalah bulanan London *Encounter* yang prestisius itu, masyarakat Barat menerima sikap, meskipun seringkali dengan setengah hati dan rasa enggan akan perlunya diskusi dan penaburan gagasan-gagasan sebagai tuntutan-tuntutan yang berkecamuk. Akan tetapi, masyarakat Barat tidak hanya menerima sikap tersebut, melainkan juga menghendaki diadakannya berbagai lembaga dan kebebasan. Yaitu, lembaga seperti, universitas-universitas, lembaga-lembaga ilmiah, per-

himpunan-perhimpunan pengetahuan beserta akademi-akademi dan pendidikan universal. Di samping kebebasan berbicara dan mengeluarkan pikiran.

Banyak yang menaruh keberatan apabila masyarakat kita dewasa ini dinamakan masyarakat Barat, tetapi keperluan-keperluan yang dikehendaki oleh masyarakat Barat di atas, kini sudah dimiliki pula oleh masyarakat kita, meskipun masih baru disempurnakan. Sebagaimana dalam masyarakat Barat terdapat aliran-aliran yang menganjurkan sistem-sistem diktatorial (komunisme) dan yang menghendaki alternatif lainnya (*counter-culture*), demikian pula dalam masyarakat kita. Walaupun aliran-aliran ini, atau setidaknya tidaknya, sebagian dari aliran-aliran ini, merupakan gejala-gejala yang bertentangan dengan peradaban Barat, namun pada hakikatnya tidak meniadakan masyarakat Barat itu sendiri. Bahwa di negara-negara Eropa Timur (dan Uni Soviet) sebelum terjadinya perubahan-perubahan sistem-sistem diktatorial tidak hanya telah dianjurkan tetapi juga telah diwujudkan, masih terdapat gagasan-gagasan yang mencerminkan sikap yang telah diterima oleh masyarakat Barat. Ambillah contoh, misalnya, *Manifest Dua Ribu Kata* di Cekoslowakia yang disusun oleh Ludvik Vaculik pada tahun 1968. Atau *Pikiran-pikiran mengenai Kemajuan, Ko-eksistensi Damai dan Kebebasan Intelektual* di Rusia yang disusun oleh mending Andrei D. Sakharov pada tahun itu juga.

Hal ini menunjukkan bahwa, dilihat dari sudut struktural, berdirinya kediktatoran-kediktatoran di Praha dan Moskwa sebelum terjadinya perubahan-perubahan tidak dengan sendirinya meniadakan masyarakat atau, lebih tepat, peradaban Barat. Tentu saja tidak dapat ditarik kesimpulan bahwa kediktatoran-kediktatoran itu adalah bagian

dari peradaban Barat, melainkan yang terakhir ini mempunyai toleransi terhadap gagasan-gagasan kediktatoran. Artinya, selama masyarakat Barat yang utuh, seperti yang dapat dilihat di Eropa Barat dan Amerika Utara, masih dapat dipertahankan maka selama itu pula berdirinya kediktatoran di bagian-bagian lain di dunia ini tidak perlu dikhawatirkan, sebab selama itu pun tersedia forum untuk menguji gagasan-gagasan yang sungguh-sungguh kreatif.

Dalam kerangka inilah saya berbicara tentang kebudayaan modern dalam sistem demokrasi Indonesia. Keprihatinan saya ialah apakah generasi-generasi yang akan datang berhak mewarisi pengertian kebudayaan yang, betapapun juga tradisionalnya, tidak akan terhapus oleh kemajuan ilmu-ilmu sosial. Posisi ini menyerupai posisi Matthew Arnold di Inggris yang menulis sebuah esai

terkenal di bawah judul *Culture and Anarchy* (1869) yang mengatakan: "Masih seringkali saya berbicara memuji kebudayaan. Saya telah berusaha untuk membuat semua karya dan cara saya mengabdikan kepada kepentingan-kepentingan kebudayaan ... saya adalah seorang liberal, namun iman saya adalah seorang liberal yang dikeraskan oleh pengalaman, perenungan dan pematangan, dan saya adalah, di atas segala-galanya, seorang yang beriman dalam kebudayaan."

Keyakinan saya bahwa kebudayaan modern mempunyai tempat dalam sistem demokrasi Indonesia diilhami oleh perubahan-perubahan di Eropa Timur. Saya melihat dua aspek utama. Pertama adalah tiadanya masa depan bagi partai komunis -- yang di Indonesia sudah merupakan suatu anachronisme. Kedua adalah peningkatan peranan kebudayaan modern.

... saya tidak dapat ditarik kesimpulan bahwa kediktatoran-kediktatoran itu adalah bagian

... universitas, lembaga-lembaga ilmiah, per-